

GENDER DAN KELUARGA MIGRAN DI INDONESIA¹

Drs. Togiartua Nainggolan, M.Si²

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa para TKW melakukan migrasi ke luar negeri dengan meninggalkan keluarganya. Hal ini menimbulkan dampak sosial psikologis terutama bagi perempuan yang sudah menikah. Lebih jauh, hal ini mencerminkan adanya kompleksitas masalah keluarga buruh migran termasuk pergeseran pola relasi gender pasca migrasi sebagai TKW. Untuk memahami hal itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian diutamakan pada wilayah pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW) seperti Lampung, Indramayu, Malang dan Makassar. Sumber data dan informan penelitian adalah TKW dan keluarganya. Informasi dari isteri ini selanjutnya akan dikonfirmasi ulang ke suami, anak, mertua, masyarakat atau tokoh lainnya yang dinilai relevan. Penentuan keluarga yang menjadi informan dilakukan dengan *snowball*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan patriarkhi dan analisis gender yang berkaitan dengan *bargaining position* dan kesetaraan antara suami dan isteri.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pasca kepulangan sebagai TKW, TKW membawa nilai-nilai baru yang diserap melalui proses akulturasi budaya di *negara perantauannya* yang didukung dengan posisi ekonomi isteri yang meningkat. Langsung atau tidak langsung kondisi ini menaikkan posisi tawar di tengah keluarganya. Hal ini memberikan ruang yang cukup bagi terjadinya pergeseran pola relasi gender lokal di tengah keluarganya, yang secara psikologis mengarah pada konsep *androgini*. Dengan konsep relasi gender ini, pembagian kerja yang semula sangat *sexist* mulai kabur. Suami mulai terlibat pada sektor domestik dan *permisif* pada nilai-nilai *pemingitan*, sementara isteri mulai terbuka pada sektor publik. Dalam hal ini pihak isteri mulai *independent* dalam membuat keputusan sehingga posisinya sebagai sub ordinat makin kabur dan mengarah pada posisi isteri sebagai mitra. Namun demikian, keluarga mengalami konflik secara potensial dan *manifest*, sehingga relatif kurang harmonis.

¹ Diangkat dari hasil penelitian tentang Pergeseran Pola Relasi Gender Keluarga Di Indonesia, oleh Togiartua Nainggolan, Faida Normawati, Ruaida Murni, Rachmanto Widjopranoto, dan Sudibyonoto.

² Togiartua Nainggolan, Peneliti Pertama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Departemen Sosial RI.

Sehubungan dengan hal tersebut kepada pihak–pihak terkait direkomendasikan untuk memberikan pelatihan bagi calon TKW dengan materi pelatihan penguatan fungsi dan tanggung jawab sosial keluarga yang mengarusutamakan pola relasi gender. Selain itu, diperlukan bimbingan dan konseling keluarga bagi keluarga mantan TKW sebagai upaya mengantisipasi dampak sosial negatif dari pergeseran pola relasi gender dalam kehidupan keluarga.

Kata kunci :

Pergeseran Pola Relasi Gender, Tenaga Kerja Wanita, Keluarga Migran

Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan, bahwa para TKW melakukan migrasi ke luar negeri dengan meninggalkan keluarganya. Hal ini menimbulkan dampak sosial psikologis terutama bagi perempuan yang sudah menikah. Lebih jauh hal ini mencerminkan adanya kompleksitas masalah pada buruh migran.

Pendapat senada dikemukakan oleh Krisnawati & Safitri (dalam Daulay, 2001) dalam sebuah tulisannya bahwa masalah buruh migran sangat kompleks karena konteksnya tidak saja soal perburuhan tetapi juga menyangkut migran internasional, kapitalisme dunia dan globalisasi. Ketimpangan pendapatan negara maju dan negara dunia ketiga, kesalahan konsep pembangunan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan secara khusus bagi TKW menyangkut masalah perempuan, yaitu masalah gender.

Selain masalah gender, sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung perubahan peta situasi keluarga pasca TKW dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga buruh migran yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) mendeskripsikan pergeseran pola relasi gender pada keluarga migran pasca migrasi sebagai buruh TKW; dan (2) mendeskripsikan gambaran keharmonisan keluarga mereka pasca migrasi sebagai TKW.

Hasil penelitian diharapkan mampu : (1) menyajikan realitas positif maupun negatif dari tindakan migrasi TKW terhadap keluarga, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi calon TKW dan keluarganya dalam membuat keputusan untuk migrasi sebagai TKW ; dan (2) bagi Departemen Sosial RI dan pihak terkait lainnya, dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengembangan program yang ditujukan bagi TKW dan keluarganya.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian diutamakan pada wilayah yang menjadi pemasok utama tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

Sumber data dan informan penelitian adalah TKW dan keluarganya, terutama dengan melihat kondisi isteri yang pernah bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Informasi dari isteri ini selanjutnya akan dikonfirmasi ulang ke suami, anak, mertua, masyarakat atau tokoh lainnya yang dinilai relevan. Pengambilan keluarga yang menjadi informan dilakukan dengan cara *snow-ball* dimana dari satu informan akan berkembang ke informan selanjutnya.

Teknik analisis data diarahkan pada pendekatan patriarkhi dan analisis gender yang berkaitan dengan *bargaining position* antara suami dan isteri serta menyangkut kesetaraan posisi di antara mereka.

Hasil dan Pembahasan

1. Realitas TKW Sebagai Persoalan Sosial Budaya

Sebagai sebuah realita sosial kehadiran TKW banyak mendapat pujian sehubungan dengan prestasinya dalam bidang ekonomi dengan sumbangan devisa yang besar, sehingga TKW diberikan predikat sebagai pahlawan devisa bagi negara. Namun, pujian dan predikat pahlawan ini dapat dikatakan semu, karena prestasi ini hanya dinilai berdasarkan indikator ekonomi, sehingga terkesan *meninabobokan* masyarakat terhadap substansi persoalan yang sesungguhnya dan cenderung menutupi kelemahan pihak tertentu sebagai penyelenggara program ini.

Penegasan ini cukup beralasan karena hingga saat ini program pengiriman TKW ke luar negeri terlalu didominasi motif pendekatan bisnis yang didefinisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok *kapitalis*. Akibatnya, prinsip hitung-hitungan ekonomi selalu menjadi ukuran. Dalam prakteknya, bagi kaum kapitalis menjadi TKW adalah menjadi “produsen” sekaligus menjadi “konsumen” dengan ukuran-ukuran yang dikonstruksikan oleh kelompok pengusaha.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas, selain peluang yang dapat

dimanfaatkan secara ekonomi, juga harus memanfaatkan peluang dari aspek sosial budaya. “Mengekspor” TKW ke luar negeri bukan saja mengirim individu TKW secara fisik tetapi sekaligus mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari berbagai aspek.

Mengacu pada model transmisi budaya dari Cavali dan Sproza (dalam Berry dkk, 1999) pertemuan antara TKW dengan majikan di negara tujuan sekaligus mempertemukan dan memfasilitasi kontak budaya dua pihak yang mengadakan transaksi jasa. Hal ini potensial memunculkan persoalan budaya dalam bentuk akulturasi dan enkulturasi dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik yang positif maupun negatif.

Fenomena ini lebih sensitif lagi karena melibatkan perempuan yang berstatus isteri dari seorang suami dan sekaligus ibu dari sejumlah anak. Bahkan secara politis adalah “ibu” dari sang masa depan bangsa. Hal yang harus menjadi catatan pertama adalah kepergian seorang ibu ke luar negeri tidak serta merta menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya dapat memunculkan masalah baru dalam konteks keluarga yang senantiasa tetap dituntut menjalankan segala fungsinya, yang secara ideal harus dikendalikan oleh suami-isteri. Hal senada dipertegas oleh Goode (1985), bahwa dengan bekerjanya sang isteri ternyata meningkatkan pertentangan dalam perkawinan. Pernyataan ini semakin relevan bagi TKW karena harus berpisah dengan keluarganya.

Secara bersamaan, meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi, mengindikasikan peningkatan secara kuantitatif, dimana jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah semakin banyak, walau angka statistiknya belum dapat disebut secara pasti. Sementara pada sisi lain, ada peningkatan dalam “jumlah bidang pekerjaan” yang semula didominasi oleh laki-laki secara berangsur dimasuki bahkan didominasi oleh perempuan, walaupun secara kualitatif hal itu terjadi pada pekerjaan kasar sebagaimana yang dialami oleh TKW.

Pada tataran global, perubahan kontemporer dalam hidup kaum perempuan ini, sebenarnya sudah dimulai pada saat modernisme menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan ideologi masyarakat. Dalam konteks ini, beban menjadi perempuan di era modern menjadi lebih berat, karena berbagai muatan nilai harus di akomodasi. Sadar atau

tidak, *trend* kehidupan mengikuti arus perubahan sosial membawa transformasi masyarakat yang melibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional ke arah modernisasi, termasuk dalam hal pergeseran pola relasi gender di kalangan buruh migran.

Perilaku penyesuaian diri dalam menerima arus informasi modernisasi dalam transmisi budaya menuntut kearifan tersendiri. Persepsi yang salah akan menimbulkan *culture shock* berupa respon negatif dan *disorientasi* yang dialami orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan budaya baru. Bagi TKW yang harus pergi ke luar negeri, persoalan semacam ini seharusnya menjadi fokus perhatian dalam perumusan kebijakan, bukan saja pada tingkat mikro, akan tetapi juga pada tingkat makro. Secara makro, proses globalisasi telah membawa keuntungan atas fenomena “perdagangan tanpa batas” dengan mendapatkan pekerja migran yang murah. Secara tidak langsung buruh migran dieksploitasi di dalam negeri sekaligus di negara tujuan. Pada tingkat mikro, pemerintah memang melakukan intervensi. Tetapi hal itu lebih ditujukan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan aliran modal yang justru mendukung globalisasi itu sendiri, tetapi tidak untuk isu kemanusiaan yang melekat pada proses migrasi itu sendiri. Akibatnya muncul berbagai efek samping yang justru tidak diharapkan.

Pada tataran inilah aspek sosial budaya dari program ekspor tenaga kerja ke luar negeri menjadi hal yang *urgen* untuk menjadikan TKW sebagai duta bangsa yang membawa nama harum bangsa dan bukan menjadi “komoditas dagang” yang mendapat perlakuan sesuai selera pasar.

2. TKW dan Rekonstruksi Gender

Sebagai bagian dari budaya, pola relasi gender menunjukkan kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domestik. Kecenderungan ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.

Pengaruh akar sosial budaya tradisional dalam mengasosiasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah memberikan warna dalam keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Pemaknaan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi ini ditentukan oleh sistem nilai adat istiadat yang memberikan peluang

sekaligus pembatasan berupa etika, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Proses sosialisasi perempuan mengarah pada terjadinya identifikasi pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat keperempuanannya. Terlihat bahwa perempuan ternyata banyak dilibatkan di sektor-sektor yang sudah terpola pada pekerjaan yang bersifat “menerima perintah”. Kecenderungan tersebut terefleksikan dalam konteks yang lebih luas, dimana pihak yang memerintah adalah laki-laki, dan pihak yang menerima perintah adalah perempuan. Selain itu, perempuan sebagai pihak yang menerima perintah, di dalam struktur kekuasaan berada di posisi yang lemah dan terlihat jelas dengan adanya hubungan-hubungan personal yang mempengaruhi ukuran-ukuran kedudukan dan kesempatan. Konstruksi gender ini menempatkan laki-laki pada ujung yang satu dan perempuan pada ujung yang lain di sebuah garis vertikal. Secara langsung konstruksi ini menegaskan posisi sub ordinat perempuan dan superioritas laki-laki.

Penjelasan tersebut menunjukkan betapa hegemoni *patriarki* melingkupi pola relasi gender lokal. Dalam konteks ini, pembagian kerja menjadi *sexist* (didasarkan pada jenis kelamin) dan dibedakan dalam suatu dikotomi dari waktu ke waktu. Relasi gender menjadi perilaku spesifik yang diharapkan dan dijadikan standar yang diterapkan pada laki-laki dan perempuan, dimana penyimpangan subjek dari ketentuan ini akan mendapatkan sanksi sosial (penilaian negatif) masyarakat. Dengan kata lain, pola relasi gender ini merupakan tingkah laku yang cocok untuk tiap-tiap jenis kelamin. Dalam hal ini, kelompok laki-laki diharapkan akan menjadi maskulin dan perempuan diharapkan menjadi feminin.

Bagi kaum perempuan, khususnya kaum isteri yang kebetulan menjadi TKW, pergeseran nilai ini justru semakin berpeluang terjadi. Konstruksi gender lokal yang dibawa dari daerah atau negara asal akan “diuji dan dievaluasi” melalui interaksi budaya di daerah tujuan perantauan dalam bentuk akulturasi budaya, khususnya budaya majikan di luar negeri. *Artinya secara tidak langsung, sadar atau tidak, TKW bersama majikannya telah melakukan rekonstruksi gender terhadap pola relasi gender lokal yang dibawa TKW. Walaupun hal itu, berjalan tanpa diantisipasi oleh penyelenggara program.*

Penjelasan tentang hal ini dikemukakan secara langsung oleh TKW bahwa secara perlahan tapi pasti mereka memasuki kehidupan keluarga majikannya sesuai dengan arahan dan petunjuk majikannya. Tanpa disadari TKW sering membanding-bandingkan kehidupan keluarganya dengan majikannya, dan memuji cara kerja anggota keluarganya yang tidak *sexist* (pembagian kerja tidak didasarkan pada jenis kelamin).

Pengakuan ini menunjukkan, bahwa TKW mengidolakan pola relasi gender majikannya. Ini berarti bahwa paling tidak pada tingkat kognitif dan afektif ada perubahan pola relasi gender dalam diri TKW secara konsepsional. Lebih jauh, hal ini terbawa dalam kehidupan berkeluarga pasca TKW.

Fenomena pergeseran ini terjadi pada 5 wilayah penelitian, walaupun dalam konteks dan kualitas yang berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa posisi isteri pasca TKW dapat memberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembongkaran terhadap pola relasi gender lokal sebagaimana dikemukakan oleh Daulay (2001). Secara umum pergeseran pola relasi gender tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perubahan Pola Relasi Gender Keluarga Migran Pasca Migrasi sebagai TKW

No.	Keadaan sebelum menjadi TKW	Keadaan setelah menjadi TKW
1.	Pencari nafkah utama adalah suami	Pencari nafkah utama adalah suami dan isteri
2.	Suami meyakini nilai-nilai pemingitan terhadap isteri	Suami mulai permisif ketika isteri masuk sektor publik
3.	Isteri fokus terhadap sektor domestik	Isteri mulai terbuka pada sektor publik
4.	Isteri tidak independen dalam membuat keputusan	Isteri mulai independen dalam membuat keputusan
5.	Suami tidak terlibat dalam sektor domestik	Sebagian suami terjun ke sektor domestik
6.	Pembagian kerja <i>sexist dikotomis</i>	Pembagian kerja mulai kabur, tidak <i>sexist</i> dan tidak dikotomis
7.	Posisi isteri sebagai sub ordinasi sangat kelihatan	Posisi isteri sebagai mitra mulai kelihatan
8.	Pola relasi gender lebih didominasi maskulin dan feminin	Pola relasi gender mengarah pada <i>androgini</i>
9.	Pengasuhan anak tanggung jawab utama isteri	Pengasuhan anak mengarah pada tanggung jawab bersama
10.	Keluarga relatif harmonis	Ada konflik yang bersifat potensial dan manifest

Kesimpulan dan Saran

Kehadiran TKW sebagai migran ternyata harus mengakomodasi berbagai nilai. Dari perspektif global dan makro, betapa globalisasi telah membawa keuntungan atas fenomena “perdagangan tanpa batas” dengan mendapatkan pekerja yang murah. Secara tidak langsung buruh migran dieksploitasi di dalam negeri sekaligus di negara tujuan. Dalam prakteknya, bagi kaum kapitalis menjadi TKW adalah menjadi “produsen” sekaligus menjadi “konsumen” dengan ukuran-ukuran yang dikonstruksikan oleh kelompok pengusaha, dengan “memperlakukan manusia sebagai komoditas”. Sementara dalam prespektif negara, TKW menyangkut persoalan devisa. Adapun bagi keluarga, khususnya yang mempunyai status isteri, TKW terkait fungsi dan tanggung jawab sosial istri terhadap suami dan atau anak. Lebih khusus lagi, dalam perspektif gender, TKW berpeluang melakukan pembongkaran pola relasi gender lokal dengan segala hegemoni patriarkhinya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan semacam “redefinisi” terhadap keberadaan program TKW dari sisi pendekatan kebijakan sosial, dengan mencoba menerjemahkan berbagai nilai ke dalam konsep dan indikator kebijakan. Penegasan ini kiranya cukup beralasan, mengingat hingga saat ini program pengiriman TKW ke luar negeri terlalu didominasi “motif pendekatan bisnis” yang didefinisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok kapitalis. *Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas secara strategis, yang harus memanfaatkan peluang tidak saja secara ekonomi tapi juga secara sosial budaya, dengan mengakomodasi berbagai nilai dalam prespektif kemanusiaan.*

Kepada Direktorat Pemberdayaan Keluarga Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja bersama LSM terkait diharapkan segera merumuskan kurikulum pelatihan bagi keluarga calon TKW menyangkut materi pola relasi gender dan persoalan sosial budaya lainnya, serta manajemen keluarga, sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan masalah yang muncul sehubungan kepergian istri menjadi TKW. Sementara pasca migrasi sebagai TKW perlu diadakan konseling keluarga sebagai upaya meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry dkk, (1999), *Psikologi Lintas Budaya, Riset dan Aplikasinya* (terjemahan Edi Subardono), Gramedia, Jakarta.
- Daulay, Harmona, (2001), *Pergeseran Pola Relasi Gender Keluarga di Keluarga Migran, Studi Kasus TKIW di Kecamatan Rawamarta Kab. Karawang Jawa Barat*. Galang Press, Yogyakarta.
- Goode, William, J, (1985), *Sosiologi Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta.